

## ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kecamatan Lengkong. Peneliti menganalisis permasalahan pada implementasi kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah : ‘Bagaimana implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di kecamatan Lengkong kota Bandung, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh camat dalam implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan.’”

Analisis masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Subarsono (2005) berdasarkan faktor-faktor krusial dalam Implementasi Kebijakan melalui : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut: Proses Implementasi kebijakan pada program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan berdasarkan pada Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi maka akan menghasilkan optimalisasi proses program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kecamatan Bandung.

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus (*Case study*). Analisis data dilakukan melalui siklus Reduksi data, Sajian data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian terhadap data dilakukan melalui uji validasi dan reliabilitas.

Faktor yang menjadi pendukung antara lain : hubungan koordinasi dengan lembaga/instansi mitra kerja lainnya yang baik, perlengkapan sarana yang cukup mendukung, anggarannya yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambat anatara lain: kurangnya sumber daya manusia yang peduli, sosialisasi kepada masyarakat kurang tidak tepat sasaran kepada seluruh masyarakat.

Hasil penelitian menemukan faktor lain yakni belum efektifnya struktur organisasi, menyebabkan sistem program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan tidak berjalan normal sehingga menimbulkan ketidak efektifan adanya monitoring dan evaluasi.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan